

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya isu pemanasan global yang terjadi di beberapa tahun terakhir merupakan permasalahan lingkungan yang sangat darurat dan perlu diatasi secepat mungkin. Saat ini masih belum ada kebijakan yang mampu untuk mencegah dampak akibat pemanasan global, baik yang dibuat oleh organisasi internasional maupun pemerintah Indonesia. Salah satu penyebab dari pemanasan global adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai laba (*profit*) melalui eksploitasi sumber daya alam. Namun hal tersebut terkadang tidak dilandasi kesadaran akan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis, bahkan cenderung mengabaikannya. Jackson et al. (2017) menjelaskan bahwa bahan bakar fosil dan industri dapat menghasilkan 90% emisi karbon dioksida dari aktivitas manusia, emisi tersebut stabil dalam 3 tahun terakhir meskipun pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global terus berlanjut.

Adanya perubahan pengelompokan sektor saham yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi IDX *Industrial Classification* (IDX-IC) menghasilkan kelompok sektor saham dengan industri yang lebih homogen. IDX-IC terbagi menjadi dua belas sektor industri, salah satunya adalah sektor produksi barang baku (*basic materials*) merupakan jenis usaha yang sangat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Sektor ini terdiri dari empat sub-sektor perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dan pertambangan, seperti barang kimia (B11), material konstruksi (B12), wadah dan

kemasan (B13), logam dan mineral (B14), serta produk hutan dan kertas (B15). Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan limbah, jika tidak diperhatikan akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan pada lingkungan (Sapulette & Limba, 2021). Sedangkan, menurut artikel yang dipublikasikan oleh Koordinator Jaringan Tambang (JATAM) menjadi bukti bahwa kegiatan eksplorasi pertambangan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan (JATAM, 2021). Bentuk pertanggung jawaban yang bisa diberikan oleh perusahaan atas dampak negatif ini adalah dengan mengalokasikan dana secara khusus untuk membuat program pelestarian lingkungan dan pengembangan sosial, sekaligus mendukung program *sustainable development* yang diusung oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, PBB.

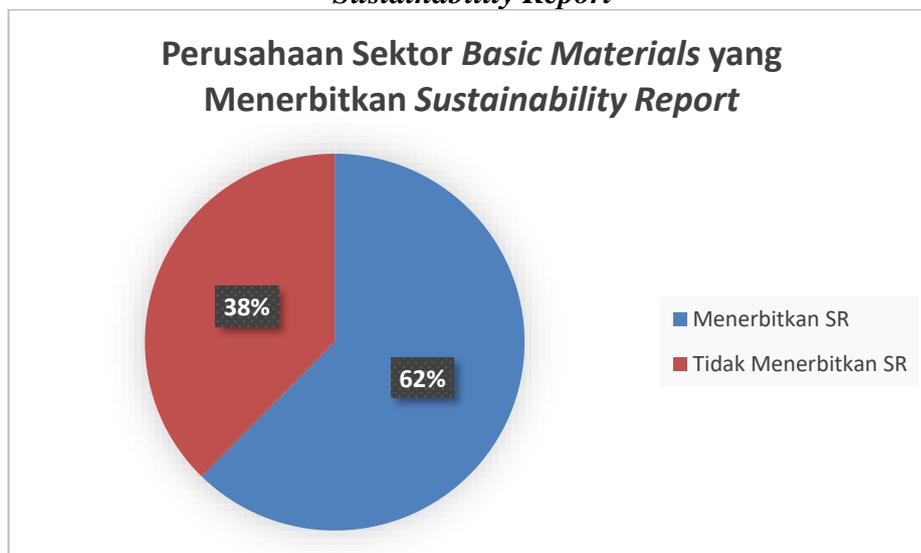
Pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat di markas besar PBB telah resmi ditetapkan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berisi 17 tujuan dan 169 dalam rangka aksi pembangunan global dalam 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030). *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan ekologis, dimana terdapat kompromi antara sumber daya yang terbatas dan pencapaian tujuan ekonomi dari suatu bisnis. Konsep *Triple bottom Line* (3P) merupakan dasar dalam mencapai *sustainable development*, dimana konsep ini dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997 dalam bukunya yang berjudul "*Canibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*" yang mengupas pentingnya *profit, planet dan people*. Dalam paradigma bisnis klasik, perusahaan hanya dibangun berdasarkan unsur

keuntungan (*profit*), tetapi sejalan dengan isu pemanasan global saat ini, organisasi mulai memperhatikan konsep 3P, tidak hanya *profit* tetapi juga *planet* dan *people*. Teori *triple bottom line* menyiratkan bahwa perusahaan harus memprioritaskan kepentingan *stakeholder* karena pihak-pihak tersebut merupakan faktor utama yang mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Latifah (2019) pada dasarnya konsep 3P bisa dianggap sama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena program-program yang dikembangkan dalam CSR menyangkut perbaikan aspek lingkungan (*planet*) dan sosial (*people*) dalam rangka mencapai keuntungan (*profit*).

Beberapa dasar hukum di Indonesia yang memuat tanggung jawab perusahaan, seperti UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menuntut perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan diungkapkan melalui suatu laporan agar dapat dijadikan bukti bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawabnya. Hasil dari program pertanggung jawaban perusahaan dapat diungkapkan secara rinci, mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga aspek lingkungan, dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*) merupakan produk revolusioner dari sistem akuntansi (Mynhardt et al., 2017). Salah satu tujuan dari *sustainable development* adalah mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan dan kemudian memasukkan informasi tersebut ke dalam pelaporan mereka.

Pada perusahaan di sektor bahan baku (*basic materials*), praktik pengungkapan *sustainability report* masih belum dilakukan sepenuhnya dan cenderung baru dilakukan pada periode 2021. Hal ini dapat terlihat melalui grafik berikut:

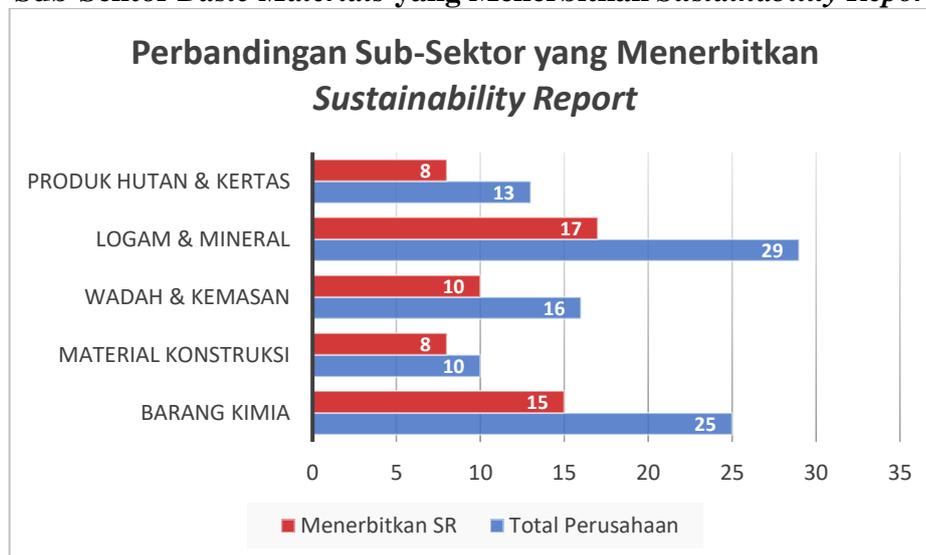
Gambar 1.1.1
Persentase Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Menerbitkan *Sustainability Report*



Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, 58 dari total 93 atau sekitar 62% perusahaan di sektor *basic materials* telah mengungkapkan *sustainability report* secara terpisah hingga tahun 2021. Dimana masih tersisa 38% perusahaan yang belum menerbitkan laporan ini, artinya perusahaan-perusahaan tersebut masih belum bisa memaksimalkan pelaksanaan tanggung jawaban sosial dan lingkungannya.

Gambar 1.1.2
Sub-Sektor *Basic Materials* yang Menerbitkan *Sustainability Report*



Sumber: Data diolah (2023)

Sedangkan jika dibandingkan menurut sub-sektornya, mengacu pada grafik di *Gambar 1.1.2* terlihat bahwa industri material dan konstruksi merupakan industri yang paling banyak mengungkapkan *sustainability report*. Dimana 80% perusahaan di bidang material dan konstruksi telah menerbitkan *sustainability report* dalam 8 tahun ke belakang.

Adanya peningkatan dampak dari aktivitas bisnis terhadap isu pemanasan global, maka akuntan dapat berperan lebih dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan sosial (SDM) melalui pengungkapan sukarela biaya-biaya terkait hal tersebut dalam laporan tahunan perusahaan. Sistem akuntansi yang mengungkapkan biaya lingkungan dan sosial disebut sebagai akuntansi hijau atau *green accounting*. Menurut Dhar et al. (2022) sistem ini tidak hanya menunjukkan perkembangan perusahaan dari sisi ekonomi, melainkan juga mencerminkan biaya lingkungan yang harus dibayar perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis. Aspek informasi terkait *green accounting* harus diungkapkan secara

rinci dan jujur, sehingga tidak terjadi asimetri informasi atau kesalahpahaman antara perusahaan, *stakeholder*, dan *shareholder* terkait informasi tersebut, terutama dalam ranah pengambilan keputusan terkait investasi. Keputusan investasi dan pembiayaan yang bernilai adalah yang berdampak signifikan terhadap *sustainable development* suatu perusahaan dengan polusi berat (Arrive & Feng, 2018). Perusahaan dengan skala yang besar seharusnya dapat membuat program CSR yang memiliki dampak perubahan yang signifikan dan hasilnya secara positif dapat dirasakan oleh masyarakat. Karena pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan bergantung pada manfaat yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga mendorong masyarakat untuk loyal kepada perusahaan.

Ukuran perusahaan mempengaruhi seberapa besar tanggung jawabnya kepada *stakeholder* maupun *shareholder*. Menurut Dewi (2020) dapat diartikan bahwa ukuran perusahaan berkaitan dengan kemampuan dan fleksibilitas suatu perusahaan dalam memperoleh laba dengan melihat pada pertumbuhan aset perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dijadikan indikator untuk mengetahui bagaimana estimasi yang dapat membantu pengungkapan pelaporan pada suatu perusahaan melalui indeks laporan keuangan. Semakin besar ukuran dan skala perusahaan akan semakin banyak pula aktivitas bisnisnya yang berdampak pada lingkungan dan sosial, sehingga tanggung jawab terhadap pengungkapan informasinya juga akan semakin besar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghazali & Rohman (2019), Roestanto et al. (2022), dan Dizar et al. (2019) menerangkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tercapainya *sustainable development*. Sedangkan

hasil penelitian yang dilakukan oleh Katoppo & Nustini (2022), Nuraeni & Darsono (2020), dan Dewi & Ramantha (2021) menerangkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tercapainya *sustainable development*. Selain itu, keterkaitan antara *green accounting* terhadap ukuran perusahaan didukung oleh hasil penelitian milik Dewi (2020) yang menyatakan ada pengaruh positif antar kedua variabel tersebut. Hasil penelitian lain milik Dhar et al. (2022), Selpiyanti & Fakhroni (2020), dan Loen (2019) menerangkan bahwa penerapan *green accounting* dalam suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap *sustainable development*. Sedangkan hasil penelitian yang bertolak belakang dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah milik Sapulette & Limba (2021) dan Rosaline & Wuryani (2020).

Fenomena atau permasalahan yang dapat diteliti dari latar belakang di atas yaitu terkait dengan pengungkapan *green accounting* serta penerbitan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang masih belum dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan publik di sektor barang baku (*basic materials*). Sejalan dengan hal itu, *green accounting* dan *sustainability report* merupakan dua elemen penting dalam mencapai *sustainable development* yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan, terutama perusahaan dengan ukuran (skala) besar, karena merupakan bentuk pertanggung jawaban perusahaan terhadap *stakeholder*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya milik Mustofa et al. (2020) yang berjudul “*Green Accounting Terhadap CSR pada Bus di Indonesia dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen yang

digunakan yaitu *sustainable development*, dimana secara teori bentuk pengungkapan pertanggung jawabannya lebih luas daripada CSR. Perbedaan yang lain terletak pada variabel intervening yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, serta objek penelitian yang akan digunakan yaitu menggunakan sektor *basic materials*. Serta, data dalam penelitian ini akan diolah menggunakan bantuan *software SmartPLS 4.0*.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi saat ini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *Green Accounting* Terhadap *Sustainable Development* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan bidang keilmuan akuntansi dalam berkontribusi untuk mengurangi permasalahan sosial dan lingkungan melalui *green accounting* yang diterapkan pada sistem bisnis perusahaan di sektor *basic materials*. Dan secara lebih lanjut, apakah penerapan *green accounting* disini dapat berdampak baik secara jangka panjang dalam upaya pencapaian *sustainable development*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh penerapan *green accounting* terhadap *sustainable development*?
2. Pengaruh penerapan *green accounting* terhadap ukuran perusahaan?

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainable development*?
4. Pengaruh ukuran perusahaan dalam memediasi penerapan *green accounting* terhadap *sustainable development*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *green accounting* terhadap *sustainable development*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *green accounting* terhadap ukuran perusahaan.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *sustainable development*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dalam memediasi penerapan *green accounting* terhadap *sustainable development*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada peneliti terkait kelebihan dan kekurangan penerapan *green accounting* terhadap pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) melalui ukuran perusahaan. Serta, wawasan atau ilmu baru

yang diperoleh selama proses penelitian ini dapat digunakan dalam dunia kerja dan kehidupan pasca kuliah.

2. Bagi Akademisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori-teori terkait pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berdasarkan *green accounting* melalui ukuran perusahaan yang sudah ada sebelumnya agar lebih relevan dan akurat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adanya penelitian ini diharapkan ke depannya dapat memberikan tambahan referensi dan dapat digunakan sebagai data pembanding atas topik penelitian yang sejalan, sehingga teori yang digunakan dalam penelitian ini dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya.

4. Bagi Investor

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait investasi pada perusahaan yang menerapkan *green accounting* dan telah menjalankan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).